

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Gede Ngurah Indra Arya. "Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19." *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8.2 (2021): 155-162.
- Anggraeny, Windy, Ai Siti Farida, and Siti Alia. "Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020." *Educoretax* 2.2 (2022): 101-119.
- Kebijakan PMK No. 44/PMK.03/2020 berlaku mulai 27 April 2020 hingga masa pajak September 2020.
- Marlina, Lili, and Syahribulan Syahribulan. "Peranan Insentif Pajak Yang Di Tanggung Pemerintah (DTP) Di Era Pandemi Covid 19." *Economy Deposit Journal (E-Dj)* 2.2 (2020).
- Nusa, A; dkk. (2017). Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah* 2 (3) 1-19.
- Pendit, I. Putu Widya Laksana, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ida Ayu Putu Widiati. "Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2.2 (2021): 418-423.
- Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 22 tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Pajak Daerah
- PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak Di Tengah Wabah Covid19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 13, 14–25.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Ustantini, S., Amin, M., & Junaidi. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan Insentif Pajak PMK 44 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Upaya Pemulihan Cash Flow. *E-Jra*, 09(02), 115–122.

Yuniarti, dkk. (2016). Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Di Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak Bumi Yang Berlaku). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 8 (1): 1-10.